

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Rezim Internasional IWC menurut penulis berdasarkan hasil penelitian, memiliki tiga kelemahan. *Pertama*, pengabaian komite ilmiah IWC, memperlihatkan bahwa prinsip *science-based* yang menjadi fondasi IWC telah menyimpang dikarenakan dinamika politik internal yang terjadi di dalam organisasi. Rekomendasi-rekomendasi yang diberikan oleh komite ilmiah, mulai dari penolakan terhadap moratorium sejak awal, penyelesaian RMP pada tahun 1992, sampai saran pencabutan perlindungan menyeluruh beberapa spesies yang sudah pulih secara konsisten selalu diabaikan oleh komisi yang mayoritas didominasi oleh anggota *anti-whaling*. Pola ini memperlihatkan bahwa IWC tidak menjalankan fungsinya sesuai dengan prinsip ilmiah yang mereka klaim semenjak konvensi tahun 1946 lalu. *Kedua*, ambiguitas pada norma yang lahir dari ketidaksesuaian antara tujuan awal konvensi 1946 menyebabkan norma semakin goyah. Kontradiksi antara tujuan awal yang berorientasi pada manajemen perburuan berkelanjutan, lalu bertransformasi menjadi rezim konservasi, menciptakan ruang tafsir yang luas. Kondisi ini sejalan dengan argumen Chayes dan Chayes bahwa ambiguitas pada perjanjian internasional menjadi salah satu penyebab utama ketidakpatuhan negara anggota. *Ketiga*, ambiguitas pada aturan-aturan semakin memperparah kondisi tersebut. Adanya mekanisme objection pada Pasal V yang tidak mensyaratkan justifikasi ilmiah, moratorium pada Pasal 10 (e) yang tidak memiliki batas waktu yang jelas, serta celah pada pasal VIII yang memberikan kewenangan penuh kepada negara dalam memberikan izin perburuan ilmiah tanpa adanya pengawasan IWC. Ketiganya secara tidak langsung menciptakan kondisi yang didefinisikan oleh Krasner sebagai *weakening of regime* disebabkan oleh ketidakpaduan antar prinsip, norma, aturan, serta praktik nyata rezim, telah menurunkan efektivitas IWC sebagai rezim

internasional. Norwegia digambarkan sebagai negara yang bereaksi secara terukur terhadap rezim yang telah kehilangan koherensinya.

Dari sisi kepentingan nasional, penelitian ini menemukan bahwa penolakan Norwegia didasari oleh faktor politik. Perburuan paus memang sudah mengakar sejak periode Viking pada abad ke-9 sehingga membentuk identitas budaya maritim nasional yang tidak dapat dengan mudah dihilangkan. Secara politis, pemerintah Norwegia mengerahkan strategi sistematis untuk membangun narasi kedaulatan dan identitas nasional melalui konstruksi opini publik, dengan melakukan kolaborasi dengan organisasi *pro-whaling*, dan *framing* moratorium sebagai ancaman kedaulatan negara atas sumber daya laut Norwegia. Strategi ini mencerminkan penggunaan kekuasaan untuk melayani kepentingan aktor untuk tujuan tertentu, sesuai dengan argumen Krasner, di mana negara secara aktif memanipulasi struktur informasi domestik untuk memastikan keuntungan kelompok politisi. Pasar domestik produk paus yang menyusut bahkan hanya sekitar satu persen konsumen rutin dan tidak ada keuntungan komersial yang kuat. Hal ini tidak menurunkan semangat pemerintah untuk terus memberikan subsidi masif kepada industri ini yang diperkirakan mencapai 2,5 juta USD/tahun. Industri ini secara tidak langsung telah bertransformasi menjadi instrumen politik yang melayani kepentingan elektoral juga identitas nasional. Hal ini mencerminkan *egoistic self-interest* di mana Norwegia memilih tetap berada di dalam IWC karena forum tersebut masih menyediakan ruang yang dapat memengaruhi kebijakan dari dalam, terlihat juga melalui keterlibatan aktif Norwegia pada pengembangan RMP yang jika diadopsi akan menjadi sebuah keuntungan bagi Norwegia juga negara *pro-whaling* lainnya.

Dengan demikian, jawaban atas pertanyaan penelitian ini adalah bahwa penolakan Norwegia terhadap moratorium IWC 1982 merupakan hasil dari gabungan dua kondisi yang saling terkait. Rezim internasional yang melemah karena ambiguitasnya sendiri, dan Norwegia yang secara rasional memanfaatkan celah tersebut demi mempertahankan kepentingan nasional mereka. Tidak akan

ada perubahan dari Norwegia mengenai perburuan paus komersial selama IWC tidak dapat menyelesaikan kontradiksi internalnya dan Norwegia tetap berada pada pendiriannya.

6.2 Saran

6.2.1 Saran Praktis

Saran praktis yang dapat penulis berikan pada penelitian ini adalah, IWC sebagai rezim internasional harus mengurangi kontradiksi dan mengedepankan konsistensi aturan dalam organisasinya. Kontradiksi antara mandat awal konvensi yang mendukung perburuan paus yang berkelanjutan dengan moratorium perburuan paus yang berlaku tanpa batas waktu yang dijelaskan. Selain itu, IWC perlu untuk mengimplementasikan *Revised Management Procedure* (RMP) yang telah disetujui secara ilmiah sejak 1994 untuk kembali memulihkan kepercayaan negara-negara *pro-whaling* dan memperkuat legitimasi rezim. Bagi Norwegia, diperlukan peningkatan transparansi juga penyediaan data ilmiah yang dapat diverifikasi secara independen untuk mendukung klaim keberlanjutan perburuan paus minke.

6.2.2 Saran Akademis

Penelitian ini mencari alasan atas ketidakpatuhan Norwegia terhadap rezim IWC yaitu moratorium perburuan paus komersial tahun 1982, sebagai saran akademis, penelitian ini dapat dilanjutkan dengan mengeksplorasi perbandingan antara kasus Norwegia dengan kasus Islandia sebagai negara dengan status non-compliance terhadap moratorium. Sebagai contoh, Islandia menggunakan mekanisme reserve setelah akhirnya kembali bergabung pada 2002. Perbandingan antar dua kasus ini dapat menghasilkan penelitian yang lebih dalam tentang strategi *non-compliance* negara dalam rezim internasional. Penelitian ini juga menyarankan kajian tentang peran aktor non-negara dalam membentuk posisi negara di forum internasional. Pada kasus Norwegia adanya peran organisasi

seperti *High North Alliance* yang juga berperan sebagai aktor transnasional yang aktif membingkai isu perburuan paus di forum internasional. Fenomena ini membuka peluang kajian terkait bagaimana batas antara aktor negara dan non-negara semakin kabur dalam diplomasi rezim internasional. Penelitian ini masih dapat dikembangkan melalui berbagai sudut pandang dan metodologi, sehingga pembahasan dan analisis dapat lebih mendalam dan luas.